



RENCANA KERJA TAHUN 2019

DIREKTORAT
PENGEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGEBAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIYAKAN WILAYAH DAN SEKTOR**

PESATUBAN DIREKTU PENGEBAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIYAKAN WILAYAH
DAN SEKTOR DIREKTU JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN

KOMOR : 103 /POLIWA/TUNEL/012/2018

TENTANG

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENGEBAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIYAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2019
DIREKTU PENGEBAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIYAKAN WILAYAH DAN
SEKTOR,**

er/ Nomor

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal ... Peraturan Direktur Jenderal Planologi
Kebudayaan dan Tata Lingkungan Nomor P.-/P/PT/SETDI/KELU./.../2018
tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kebudayaan dan Tata
Lingkungan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Pengobatan
Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Pengobatan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
tentang Rencana Kerja Direktorat Pengobatan Dampak Lingkungan Kebijakan
Wilayah dan Sektor Tahun 2019

- er/ Nomor :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lambanan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lamban
Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rencana Kebudayaan
(Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan
Lamban Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Perengah Nasional (RPJPN) Tahun 2015-2019 (Lamban
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lamban Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor P-42/Menkebu/1/2016 tentang
Sistem Perencanaan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 460);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor P-69/Menkebu/1/2011 tentang
Rencana Kebudayaan Tingkat Nasional (SKRN) Tahun 2011-2010
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Nomor P.
10/MenLHK-H/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Nomor
P-30/MenLHK-S/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1193);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Nomor
P-51/MenLHK/SETJEN/KUM/L/10/2017 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Keudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1447);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Nomor
P-52/MenLHK/SETJEN/KUM/L/10/2017 tentang Rencana Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509);
11. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kebudayaan dan Tata
Lingkungan Nomor P-3/P/PT/SETDI/KELU/011/2017 tentang
Direktur Jenderal Planologi Kebudayaan dan Tata Lingkungan
Tahun 2015-2015;
12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kebudayaan dan Tata
Lingkungan Nomor P-2/P/PT/SETDI/KELU/011/2017 tentang
Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kebudayaan dan Tata
Lingkungan Tahun 2017;

13. Peraturan...

13. Peraturan Direktorat Peneguhan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Nomor P.1/PDLWS/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Peneguhan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Mendapatkan : PERATURAN DIREKTUR PENEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Peneguhan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Peneguhan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana operasional kegiatan dan anggaran Lingkup Direktorat Peneguhan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Desember 2018

PE. DIREKTUR PENEGAHAN DAMPAK
LINGKUNGAN/KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR,


Dr. Ary Sudjana, M.Sc.
NIP. 19681011 199403 1 001

Lampiran

Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
Nomor : P.03/PDLKWS/TU/KEU.0/12/2018
Tanggal : 4 Desember 2018

Tentang

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

PERATURAN DIREKTUR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
PENGANTAR DIREKTUR	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan SDM	3
II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018	
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018	5
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018	12
III. RENCANA KERJA TAHUN 2019	
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional	14
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan, dan Elemen Kegiatan Tahun 2019	19
IV. PENUTUP	
V. LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Uraian	Hal
Tabel 1	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PDLKWS	1
Tabel 2	Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direktorat PDLKWS Berdasarkan Jabatan Fungsional Sampai Tahun 2018	4
Tabel 3	Status Reviu KLHS Tahun 2017	5
Tabel 4	Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2017	8
Tabel 5	Perkiraan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2018	10
Tabel 6	Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017	12
Tabel 7	Perkiraan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2018	13
Tabel 8	Indikator dan Target Kegiatan Pencegahan dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019	15
Tabel 9	Sasaran Kegiatan dan Indikator Pendukung Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019	16
Tabel 10	Struktur Kegiatan Tahun 2019	17

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Uraian	Hal
Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3
Gambar 2	Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direktorat PDLKWS Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	4

PENGANTAR DIREKTUR

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Palanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 serta merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (Rensta) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2015 – 2019.

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 merupakan acuan yang memuat gambaran program, kegiatan dan anggaran Direktorat selama satu tahun pada seluruh unit eselon III lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagai penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019.

Akhir kata, Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipergunakan sehingga segala upaya pencegahan dampak lingkungan pada tingkat wilayah maupun sektor yang sudah direncanakan untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2019 dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2018

Ir. Azy Sudjianto, M.SE
Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor



Ir. Azy Sudjianto, M.SE
NIP. 19681011 199403 1 001

01 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RK) Tahun 2019, program dan kegiatan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam pencapaian pembangunan nasional terutama dalam prioritas nasional pembangunan wilayah khususnya program prioritas pembangunan pedesaan dan reformasi agraria yang merupakan salah satu agenda prioritas nawa cita.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam upaya tercapainya pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas **"melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor"**.

Sebagai salah satu unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor memiliki peran penting dalam memperbaiki tata kelola lingkungan hidup nasional khususnya dalam bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor. Untuk menjalankan peran tersebut, maka dalam Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2015 – 2019, dirumuskan arah kebijakan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam 5 tahun kedepan serta strategi pencapaiannya dijabarkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PDLKWS



Guna mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai program planologi kehutanan dan tata lingkungan, maka sasaran dan indikator yang harus dicapai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor untuk menjaga daya dukung dan daya tampung dengan indikator seluruh pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor terlaksana.

Tujuan penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019.
2. Memberikan gambaran dari seluruh kegiatan lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan mempunyai kedudukan serta peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan.

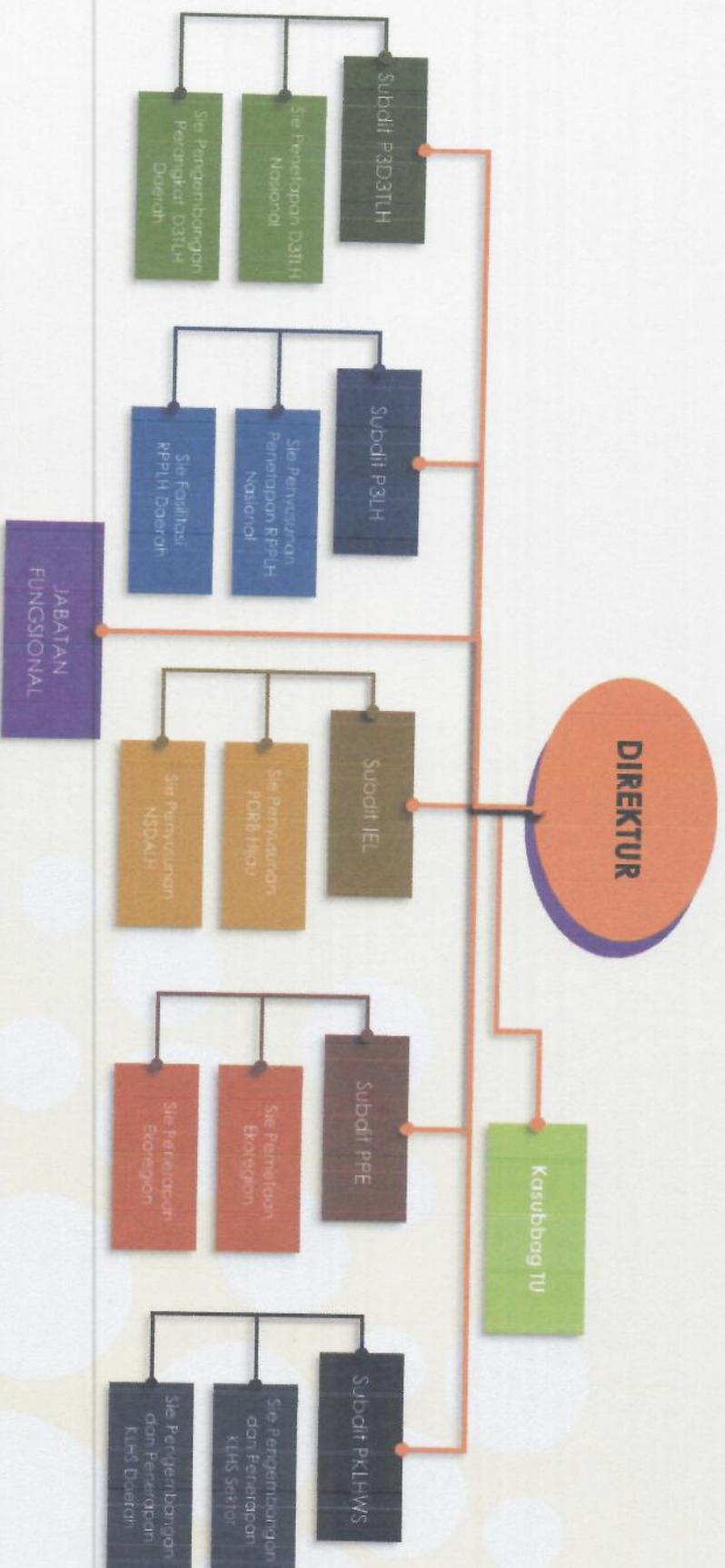
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi :

1. penyajian perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
2. penyajian koordinasi dan sinkronisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan pelaksanaan administrasi Direktorat;
- 4.
- 5.
- 6.

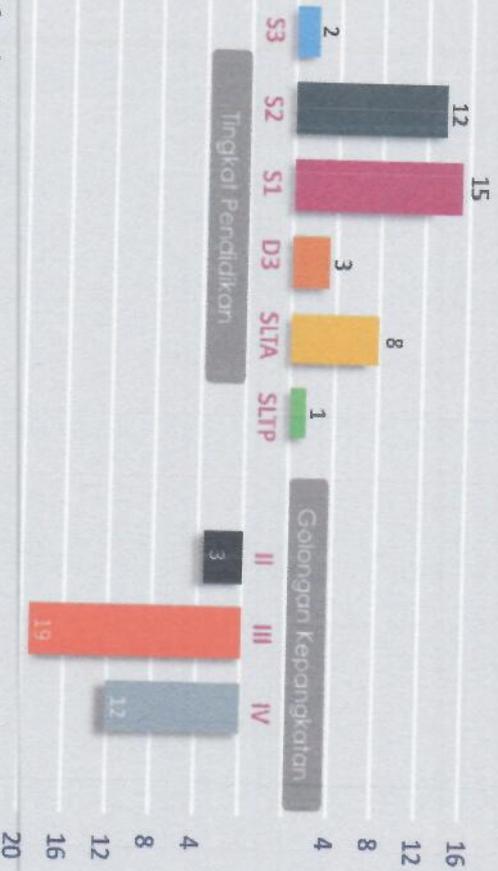
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Struktur organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan bulan Desember 2018 berdasarkan golongan adalah 34 orang. Komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jabatan fungsional lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan bulan Desember 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Gambar 2. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direktorat PDLKWS Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

Tabel 2. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direktorat PDLKWS Berdasarkan Jabatan Fungsional Sampai Tahun 2018

Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah (orang)	Σ(jumlah)
Pelaksana Lanjutan	1	3
Pelaksana	2	
Pertama	3	4
Calon perencana	1	
Pertama	1	1

Meskipun secara struktural berada langsung dibawah Direktur, dalam pelaksanaan tugas harian para pejabat fungsional tersebut ditempatkan dibawah Sub Direktorat dengan pembinaan oleh masing-masing Kepala Sub Direktorat. Hal tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya tenaga staf non struktural sehingga selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai pejabat fungsional juga ditugaskan untuk membantu urusan teknis maupun non teknis kegiatan Subdit-subdit terkait.

Dalam penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Tahun 2019, capaian-capaian pada tahun tahun sebelumnya sangat penting untuk diperhatikan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PROGNOISIS TAHUN 2018

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Capaian pelaksanaan unit kegiatan tahun 2018 merupakan kondisi konkrit yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun perencanaan unit kegiatan tahun 2019, untuk kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran unit kegiatan yang akan dilaksanakan.

A. Sasaran Pertama : Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas

1. Jumlah KLHS Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung

Pada tahun 2017 terdapat kewajiban KLHS yang masuk kedalam prioritas nasional yaitu terjaminnya kualitas KLHS terhadap Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ditingkat provinsi. Sasaran implementasi kewajiban KLHS RTRLN dan RZWP3K meliputi pencapaian standar kualitas yang menggunakan pendekatan dan indikator Daya duku dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT LH).

Capaian KLHS RZWP3K yang telah divalidasi pada tahun 2017 adalah sebanyak 6 (enam) KLHS RZWP3K dari target capaian yaitu 6 KLHS RZWP3K yang tervalidasi serta 1 (satu) KLHS RTRLN dari target capaian yaitu 1 KLHS RTRLN.

2. Jumlah KLHS yang Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung Daya Tampung

Pada tahun 2017 Direktorat PDLKWS juga telah melaksanakan kegiatan yang mencakup bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan. Realisasi fisik KLHS daerah dan sektor yang terjamin kualitasnya berbasis DDDT sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) KLHS.

3. Jumlah KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun

Direktorat PDLKWS juga telah melaksanakan kegiatan yang melibatkan beberapa KLHS sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rincian kegiatan ini mencakup konsultasi, verifikasi persyaratan, reviu kelayakan, dan penerbitan surat validasi. Capaian jumlah KLHS yang tereviu kelayakannya pada tahun 2017 yaitu sebanyak 15 (lima belas) dari target yang ditetapkan sebanyak 15 KLHS.

Tabel 3. KLHS Yang Tereviu (Tervalidasi) Kelayakannya Tahun 2017

No	Provinsi/Kabupaten/Kota
1	RTRW Jawa Tengah
2	RTRW DI Yogyakarta
3	RPJMD Kep Bangka Belitung
4	RPJMD Gorontalo
5	RTR KSP Pantura Jakarta
6	RTR KSP Pantai Timur Jambi
7	RTR KSP Agrooadian Ien
8	RTR KSP Agrooadian Willis
9	RTR KSP Danau Maninjau
10	RTR KSP Pelabuhan SempangBuru
11	RTR KSP Danau Limboto
12	RTR KSP Kota Gorontalo
13	RTRW Jawa Barat
14	RPJMD Sulawesi Utara
15	Pegunungan Kendeng Utara

8. Sasaran Kedua : Tersusunnya RPPH Nasional dan RPPH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD

1. Jumlah RPPH Nasional Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung, yang Telah Disusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah Pada Tahun 2017, dilakukan penelaahan yang lebih mendalam terkait isi dan arahan dokumen RPPH Nasional melalui kegiatan Review Dokumen RPPH Nasional. Dokumen ini menjadi bagian utama dan tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah tentang RPPH yang sudah mencapai draft akhir dan siap dilakukan pembahasan lanjutan (harmonisasi) di tingkat kementerian terkait. Selain itu, dilaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Jumlah RPPH Provinsi yang Tersusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah Daerah
 Pada tahun 2017, kegiatan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPH Provinsi telah dilaksanakan pada 5 (lima) Provinsi dengan rincian 3 (tiga) Provinsi di Ekoregion Sumatera dan 2 (dua) Provinsi di Ekoregion Kalimantan. Selain itu, telah dilaksanakan juga bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPH Provinsi lainnya yang diselenggarakan di Kantor Direktorat PDLKWS.
3. Jumlah RPPH Kab/Kota yang Tersusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah Daerah
 Sementara itu, kegiatan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPH Kabupaten/Kota juga telah dilaksanakan pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Ekoregion Sumatera. Selain dilaksanakan sesuai target DIPA tahun 2017, juga telah dilaksanakan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPH Kab/Kota lainnya yang diselenggarakan di Kantor Direktorat PDLKWS.
4. Jumlah Penetapan Indikasi Daya Dukung Nasional dengan Pendekatan Jasa Ekosistem Pada Setiap Ekoregion
 Tahun 2017, Direktorat PDLKWS telah menetapkan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional tahun 2017 meliputi pemetaan lingkungan penyedia air di Pulau Jawa dan Sumatera, serta penghitungan status daya dukung airnya.
 Dalam menyusun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, khususnya untuk daerah, dibutuhkan perangkat peraturan tentang Tata Cara Penentuan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Direktorat PDLKWS juga sudah melakukan penyusunan draft peraturan menteri tersebut. Selain itu, telah dilakukan juga fasilitasi, bimbingan dan asistensi teknis dalam penyusunan DDDTLH daerah.
5. Jumlah Satuan Peta Ekoregion Pada Skala 1:250.000
 Pada tahun anggaran 2017 oupjut Sub Direktorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion yakni sebanyak 9 Satuan, terdiri dari Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kegiatan ini dilakukan juga penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000. Penyempurnaan peta dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion agar memastikan kesesuaian penafsiran peta dengan kondisi lapangan. Selain itu ada beberapa kegiatan pendukung yang juga telah dihasilkan sebagai berikut :
 1. Draft Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia untuk mengukuhkan bahwa Ekoregion Indonesia terdiri dari 177 ekoregion darat dan 18 ekoregion laut.
 2. Draft Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ekoregion.
 3. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000
 Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi teknik pemetaan di Provinsi Di Yogyakarta.

C. Sasaran Ketiga : **Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau**

Salah satu output yang diharapkan dari kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah tersusunnya neraca SDA LH dan PDRB Hijau Provinsi/Kabupaten/Kota pada ekoregion Kalimantan sebagai bahan penyusunan neraca SDA Nasional dan PDRB.

Pada Tahun 2017, sudah tersusun 1 (satu) Neraca SDA LH dan 1 (satu) PDRB.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup juga telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 10 November 2017.

Panduan Pelaksanaan Instrumen Jasa Lingkungan yang disusun ditujukan bagi pemerintah dan KPD untuk melaksanakan program Kompetensi jasa lingkungan dan program Imbal jasa lingkungan serta para praktisi yang melaksanakan program Pembayaran Jasa Lingkungan

Tabel 4. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET	CAPAIAN
KLHS Tata Ruang Laut Nasional dan Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan Terjamin Kualitasnya Berbasis DDDT	Jumlah KLHS Tata Ruang Laut Nasional dan Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan Terjamin Kualitasnya Berbasis DDDT	1 KLHS RTRLN dan 6 KLHS RZWP3K	1 KLHS RTRLN dan 6 KLHS RZWP3K
		10 KLHS	10 KLHS
KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	15 KLHS	15 KLHS
		1 Dok Review RPPLH Nasional	1 Dok Review RPPLH Nasional
RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah	5 RPPLH Prov.	5 RPPLH Provinsi
		10 RPPLH Kab/ Kota	10 RPPLH Kab/ Kota
RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	1 penetapan	1 DRAFT Penetapan
		9 Satuan Peta	9 Satuan Peta
Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	1 Neraca dan 1 PDRB	1 Neraca dan 1 PDRB
		12 Bulan	12 Bulan
Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau Layanan Perkantoran	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan

2. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam periode pembangunan lima tahunan (2015-2019), hal ini bermakna bahwa tahun 2018 merupakan kelanjutan dalam meletakkan kondisi pengungkit akselerasi pencapaian target pembangunan satu tahun berikutnya, yaitu percepatan penataan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampungnya. Pada Tahun ini, terdapat penambahan Sasaran Kegiatan yang berasal dari Prioritas Nasional terkait Kemaritiman, yaitu Penjaminan Kualitas KLHS Tata Ruang laut Nasional (RTRUN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pua-u-pulau Kecil (RZWPR3K).

Perkembangan pencapaian pelaksanaan kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tahun 2018 dimonitor dan dievaluasi setiap bulan selama tahun berjalan. Sampai dengan Bulan November 2018, Capaian Indikator Kinerja 2018 sudah mencapai 90% lebih dengan menyelesaikan kegiatan yang sifatnya finalisasi dokumen.

Kegiatan penyusunan, pembahasan, dan finalisasi NSPK masih merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan mengingat nilai pentingnya sebagai bagian dari prakondisi pelaksanaan kegiatan Direktorat.

Disamping itu, kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah berjalan seperti pembinaan teknis (KLHS, RPPUH, DDDTLH, dan Ekoregion) ke Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta kegiatan validasi KLHS tetap dilakukan dengan beberapa inovasi, seperti diadakannya Klinik untuk pelayanan konsultasi Pemerintah Daerah yang cukup efektif dan efisien.

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional mengalami kemajuan yang signifikan. Beberapa perbaikan dan penyempurnaan muatan Dokumen RPPUH juga terus dilakukan.

Selain itu, pada tahun 2018 ini, Direktorat PDLKWS mendapat penugasan untuk mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyelesaian permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan Pegunungan Karst Kendeng yang sempat mengemuka dan menjadi headline sehingga menjadi permasalahan yang cukup serius untuk segera dicari jalan keluarnya.

Capaian yang sangat penting dan menjadi faktor yang sangat menentukan kinerja Direktorat ke depan dan akan sangat berperan penting dalam perkembangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya adalah segera ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Permen LHK tentang KLHS, Peta Ekoregion Nasional, Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Nasional.

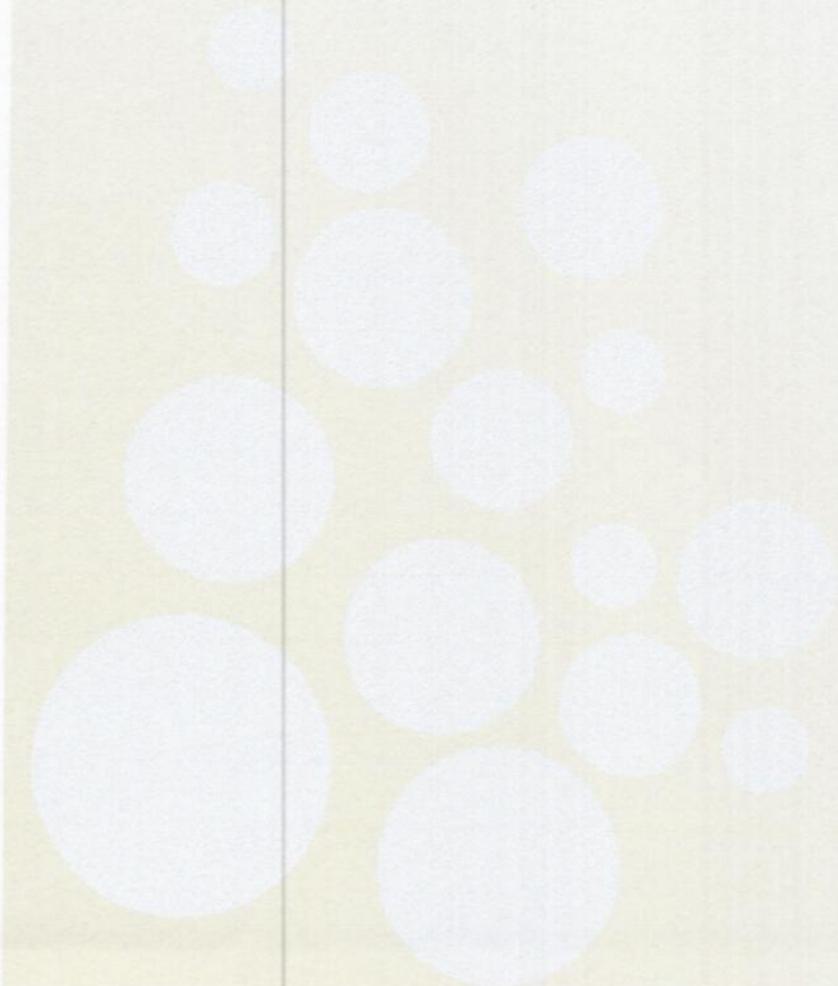
Perkiraan Capaian Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE) tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tahun 2018 seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Perkiraan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (Unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Kegiatan Kunci (Sub-Komponen/ Benero Kegiatan)	Target 2017	Persentase Realisasi (%)
Terfokuskannya analisis lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	Pengendalian dan penjaminan kualitas KLHS rencana tata ruang laut nasional	Terjaminnya kelayakan dan kualitas KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional	KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang terjamin kelayakan dan kualitasnya	Fasilitasi dan Bimbingan Teknis KLHS RTRLN Validasi kelayakan KLHS RTRLN	1 KLHS RTRLN	0%
		Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	Terjaminnya kelayakan dan kualitas KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang terjamin kelayakan dan kualitasnya	Bimbingan Teknis KLHS RZWP Validasi kelayakan KLHS RZWP	1 KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	200%
Terfokuskannya analisis lingkungan bagi semua KIRW RPP, RPJMN dan KRP. Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Terjaminnya Kualitas KLHS berbasis DDDT	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	Penyusunan NSPK KLHS Bimbingan Teknis KLHS daerah Koordinasi Nasional KLHS Validasi kelayakan KLHS Sektor	1 Permen LHK Minimal 10 KLHS	100%
		Review kelayakan KLHS sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Terwujudnya kelayakan Dokumen KLHS	Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya	Validasi kelayakan KLHS Provinsi	Minimal 15 KLHS	100%
Tersusunnya RPP/LH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Kencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelaksanaan dan pemecahan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPP/LH Nasional yang tersusun (1 RPP/LH Nasional), Jumlah Review RPP/LH Nasional (1 Dokumen Midterm Review RPP/LH Nasional)	Penyusunan/Perempurnaan/Review RPP/LH Nasional	Tersusunnya/terwujudnya Dokumen RPP/LH Nasional	Hasil Review Dokumen RPP/LH Nasional	Penyusunan NSPK RPP/LH Nasional	Draft RPP/LH	100%
		Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPP/LH Provinsi	Terselenggaranya Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPP/LH Provinsi	RPP/LH Provinsi yang tersusun sesuai dengan pedoman, ditetapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis Penyusunan NSPK RPP/LH Provinsi	Draft Permen	100%
		Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis RPP/LH Provinsi	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis RPP/LH Provinsi	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis RPP/LH Provinsi	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis RPP/LH Provinsi	5 RPP/LH Provinsi	100%

Tabel 5. Perkiraan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (Unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Kegiatan Kunci (Sub Komponen/ Elemen Kegiatan)	Target 2018	Perkiraan Realisasi (%)	
Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelaksanaan dan pemantauan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah penetapan indikator daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Penetapan dan update (pembauran) indikator daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Tersusunnya indeks daya dukung dan daya tampung LH Nasional	Jumlah penetapan indikator daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Pengembangan NSPK dan metode DDDT Lingkungan Hidup	Penetapan Indikator DDDT lingkungan hidup nasional	1 penetapan Indikator DD DT Nasional	100%
						Pengembangan NSPK dan metode DDDT Lingkungan Hidup	1 Draft Pedoman Penyusunan DDDTLH	100%
Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDRB Nasional (Terterdanya dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Tersedianya peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis DDDTLH daerah	Pemetaan Ekoregion	9 Satuan Peta ekoregion dan ekoregion Bali, Nusa	100%
						Sosialisasi dan Asistensi Peretapan Ekoregion	2 Provinsi	100%
Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDRB Nasional (Terterdanya dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan neraca SDA LH, dan PDRB Hijau	Tersusunnya Neraca SDA LH, dan PDRB Hijau	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA LH Tamatik	Fasilitasi Penyusunan PDR/PDRB yang disesuaikan	1 Dok PDRB Hijau Kabupaten	100%
						Layanan perkantoran	12 Bulan	100%
Good governance kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor					Pengadaan/pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100%	100%	





**CAPAIAN SERAPAN
ANGGARAN TAHUN 2017 DAN
PROGNOSIS TAHUN 2018**

1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017

Pada Tahun anggaran 2017, anggaran Direktorat PDLKWS ditetapkan sebesar Rp 3.881.732.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk membiayai 9 output dan 1 layanan/Perkantoran.

Berdasarkan hal tersebut, secara riil, anggaran DIPA tahun 2017 yang dapat dilanjutkan sebesar Rp. 3.852.313.666 (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau setara dengan 99,24% dari anggaran yang ditetapkan. Capaian serapan anggaran Tahun 2017 disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017

2. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017

Tabel 7. Peletraan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2017

Komponen (unit) Kegiatan	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/ Elemen Kegiatan)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Pengendalian dan Peningkatan Kualitas KUH5 rencana tata ruang laut nasional	Fasilitasi dan Bimbingan Teknis KUH5 RTRLN	8.622.000	99,10
	Validasi kelengkapan KUH5 RTRLN	11.480.000	72,29
Pengendalian dan Peningkatan Kualitas KUH5 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	Bimbingan Teknis KUH5 RZWP	29.790.300	98,64
	Validasi kelengkapan KUH5 RZWP	112.569.401	99,16
Peningkatan Kualitas KUH5 berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KUH5 per tahun	Penyusunan NSPK KUH5 daerah	96.439.500	96,98
	Bimbingan Teknis KUH5 daerah	222.768.800	99,81
Review kelengkapan KUH5 sebanyak minimal 100 KUH5 per tahun	Koordinasi Nasional KUH5	94.390.000	98,95
	Validasi kelengkapan KUH5 Sektor	92.040.165	99,76
Penyusunan Penyempurnaan/Review RPP/LH Nasional	Validasi Kelengkapan KUH5 Kerdeng Uluara	118.392.800	99,57
	Penyusunan NSPK RPP/LH Nasional	253.422.237	99,46
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis	Midterm Review RPP/LH Nasional	88.515.500	99,89
	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis	115.177.600	99,91
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis	Penyusunan NSPK RPP/LH Provinsi	42.860.000	98,53
	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis RPP/LH Provinsi	123.727.000	99,23
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis	Penyusunan NSPK RPP/LH Kab/Kota	34.860.000	99,43
	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis RPP/LH Kab/Kota	122.973.100	99,91
Periapan dan update (pembinaan) indikator daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Penetapan indikator DDDT lingkungan hidup nasional	187.551.158	99,63
	Pengembangan NSPK dan metode DDDT Lingkungan Hidup	64.713.302	99,96
Penyusunan Skoring Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis DDDTLH daerah	42.020.000	100,00
	Penyusunan Skoring Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	38.366.388	100,00
Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250000	Pemetaan Ekoregion	1.68.189.180	99,88
	Sosialisasi dan Asistensi Penerapan Ekoregion	83.783.460	99,44
Penyusunan rencana SDA LH, valuasi ekonomi SDA LH dan PDBs Hijau	Fasilitasi Penyusunan Rencana SDA LH Tematik	121.951.104	97,11
	Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB yang disesuaikan koordinasi, monitoring dan evaluasi penerapan instrumen Ekonomi	121.951.104	97,11
Layanan Perencanaan	Lingkungan dengan Instansi Terkait	66.781.800	96,91
	Penyusunan Pedoman Valuasi Ekonomi	99.438.989	96,86
Layanan Perencanaan	Sosialisasi PP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan	29.929.000	99,95
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perencanaan Direktorat PDLKWS	552.927.489	99,77
Layanan Perencanaan	Pemeliharaan / Perbaikan Perawatan Kantor	13.328.500	99,87
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Berrtor 4/2	240.521.193	99,95
Layanan Perencanaan	Pengadaan Perawatan dan Fasilitas Perencanaan	485.866.000	99,90
	Jumlah Prognosis Serapan	3.852.313.666	99,24

Berdasarkan serapan sampai dengan November 2017 yang sudah mencapai 84%, peletraan Serapan DIPA tahun 2017 sebagaimana Tabel berikut :

1. Perpindahan Kantor dari Kebon Nanas ke manggala Wanabakti, menyebabkan penambahan pada Belanja modal secara signifikan untuk keperluan perbaikan/penyiapan ruangan.
2. Fasilitasi KLHS Kerdeng Tahap II, kegiatan yang sebelumnya tidak ada dalam Renja maupun Rensira, yang sebagian besar anggarannya dibebankan pada DIPA Direktorat PDLKWS.

A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan RKP Tahun 2019, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ikut bertanggungjawab dalam pencapaian 2 (dua) Prioritas Nasional, yaitu Pembangunan Pedesaan dan Reforma Agraria. Program Prioritas Nasional tersebut menurunkan 2 (dua) kegiatan prioritas yaitu **Kegiatan Prioritas Pengelolaan SDA Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumberdaya Hutan dan Kegiatan Prioritas Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria**, yang keduanya tidak dikaitkan secara langsung dengan kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) Tahun 2019.

Selanjutnya, mengacu kepada tujuan Rencana Kerja Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 yaitu **Memastikan Kawasan Hutan yang Mantap dan Lingkungan yang berkelanjutan Sebagai Prakondisi Pembangunan Nasional terutama untuk Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**, yang salah satu arah kebijakannya adalah **Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sector pembangunan**, maka Direktorat PDLKWS sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan, terutama yang terkait pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, tidak menimbulkan efek yang merugikan baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang serta dapat menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

- Terkait dengan hal tersebut, maka dukungan Direktorat terhadap Program Planologi, KLHK, dan Prioritas Nasional adalah dengan menyiapkan perangkat **safeguarding** lingkungan hidup untuk membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengevaluasi manfaat dan dampak pembangunan bagi warga negara. Untuk tujuan tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dilakukan, yaitu:
1. **Memperkuat alas hukum safeguarding lingkungan melalui percepatan penyelesaian aturan-aturan turunan dari UU 32/2009 untuk memberi kepastian dasar kerja sehingga dapat benar-benar dilaksanakan di lapangan.**
 2. **Memperkuat jejaring kerja dengan K/L, Pemda, dan Lembaga terkait lainnya dalam mendorong pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi ke masa depan.**
 3. **Meningkatkan kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan yang tidak didasarkan atas kapasitas /DDDT lingkungan hidup dengan berperan aktif dalam penyelesaian isu-isu lingkungan skala nasional yang terjadi.**

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan, dan Elemen Kegiatan Tahun 2019

Pada dasarnya, kegiatan tahun 2019 harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Wilayah dan Sektor dengan memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2017, keberlanjutan proses, serta kendala-kendala yang terjadi dan/atau potensial terjadi.

Secara umum melalui Rencana Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Wilayah dan Sektor diharapkan dapat memastikan terjaminnya kualitas KLHS yang berbasis daya dukung dan daya tampung serta telaksananya review kelayakan KLHS; tersusunnya RPPLH yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan nasional maupun daerah (provinsi/kota/kabupaten); tersusunnya Neraca SDA-LH, Valuasi Ekonomi SDA-LH dan PDRB Hijau; Ditetapkannya indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Tersedianya peta ekoregion pada skala 1:250.000 serta terselenggaranya kegiatan perkantoran secara lancar dalam 1 tahun.

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019, Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor memiliki 3 (tiga) Sasaran kegiatan yang dibagi ke dalam 9 (sembilan) target indikator/output kegiatan serta 1 (satu) Sasaran Kegiatan pendukung, sebagaimana pada Tabel 8 disamping.

Selain kegiatan di atas, dalam rangka upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan, maka dilakukan kegiatan-kegiatan dengan target-target/output secara strategis mendukung (praktoris) tercapainya output kegiatan dan dalam kategori yang lebih luas dapat mendorong bekerjanya sistem pencegahan dampak lingkungan secara nasional, baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan-kegiatan pendukung tersebut dapat dijabarkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Indikator dan Target Kegiatan Pencegahan dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	
Telaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RZP, RZJM dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS zona wilayah pasisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	5 KLHS RZWP3K	
	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DDDI	10 KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	
	Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya	15 KLHS yang terreview kelayakannya	
	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditayangkan dan menjadi acuan pemerintahan	1 Dokumen Arahan Implementasi RPPLH	
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, ditayangkan dan menjadi acuan pemerintahan	5 Dokumen RPPLH Provinsi	
	Jumlah RPPLH Kabupaten yang tersusun, ditayangkan dan menjadi acuan pemerintahan	10 Dokumen RPPLH Kab/Kota	
	Jumlah perbandingan indikasi daya dukung nasional dengan perencanaan zona ekoregion pada setiap ekoregion	1 Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung LH Nasional	
	Jumlah acuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	1 Dokumen Peta Ekoregion pada Skala 1 : 250.000	
	Tersusunnya Neraca SDA-LH Prov./Kab./Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDA Nasional dan PDB Hijau	Rekomendasi kebijakan perorngkat ekornomi lingkungan	2 Dokumen
	Terselenggaranya kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor yang efektif dan efisien	Layanan perkantoran	1 Layanan

Tabel 9. Sasaran Kegiatan dan Indikator Pendukung Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Pendukung Tahun 2019	Target Pendukung Tahun 2019
<p>Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RZUP, RPJMN dan KRP Prioritas</p> <p>Terusunnya RPPH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Terlaksananya pelaksanaan dan pemantauan SDA dan LH yang berkelanjutan)</p> <p>Terusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai Input Neraca SDA LH dan PDRB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)</p>	<p>Meningkatnya kapasitas penyusunan KLHS Rencana Zonas Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dan penyusun KLHS RPJMD dan KLHS RTRW</p> <p>Tersedianya Model KLHS Rencana Zonas Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil</p>	<p>1 Laporan</p> <p>1 KLHS</p>
	<p>Tersedianya Sistem Informasi KLHS</p> <p>Diterapkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tentang KLHS</p> <p>Terjalinnya kerjasama dan kesepahaman para pihak penyusun KLHS Pusat dan Daerah</p> <p>Tersedianya Hasil Identifikasi KRP yang berdampak pada kerusakan lingkungan</p>	<p>1 Kegiatan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 KRP Nasional</p>
	<p>Tersedianya PP RPPH Nasional</p> <p>Terselenggarakannya andan RPPH Nasional oleh sektor dan daerah</p> <p>Tersedianya Permen RPPH Daerah</p> <p>Diterapkannya Konsep DDDTLH dalam perencanaannya di daerah</p> <p>Diterapkannya Konsep Ekoregion dalam perencanaannya di daerah</p>	<p>1 PP/Draft PP</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Permen</p> <p>1 Laporan Birek</p> <p>1 Laporan Birek</p>
	<p>Meningkatnya akurasi Peta Ekoregion</p> <p>Terselenggarakannya PP 46/2017</p> <p>Terjalinnya kerjasama</p>	<p>Update Sarban Peta Ekoregion Baki - Nusro</p> <p>1 Laporan</p>
	<p>Tersedianya NSRF/Permen Turunan PP 46/2017</p>	<p>1 Permen LHK</p>
	<p>Penerapan PP Instrumen Ekonomi LH</p>	<p>1 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi</p>

Berdasarkan target - target tersebut, kemudian disusun rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, mulai dari tingkat Kegiatan sampai dengan tingkat Elemen Kegiatan, yang menggambarkan struktur kegiatan secara utuh yang nantinya akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam penganggaran melalui RKA-K/L Tahun 2019.

Tabel 10. Struktur Kegiatan Tahun 2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
<p>Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor</p>	<p>Telaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RRJ, RPJMN dan KRP Prioritas</p>	<p>Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir</p>	<p>Bimbingan Teknis KLHS RZWP3K</p>
		<p>Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun</p>	<p>Validasi kelayakan KLHS RZWP3K</p>
		<p>Review kelayakan KLHS sebanyak minimal 100 KLHS per tahun</p>	<p>Bimbingan Teknis KLHS daerah</p>
		<p>Penyusunan/penyempurnaan RPPPLH Nasional</p>	<p>Penyusunan juklak/juknis penyelenggaraan KLHS</p>
		<p>Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPPLH Provinsi</p>	<p>Validasi kelayakan KLHS Sektor</p>
		<p>Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPPLH kab/kota</p>	<p>Validasi kelayakan penyusunan RPP-RPPPLH Review 5 Tahunan RPPPLH Nasional</p>
		<p>Layanan Internal Organisasi</p>	<p>Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPPLH Nasional</p>
		<p>Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p>	<p>Bimbingan Teknis Penyusunan RPPPLH Kabupaten/Kota</p>
		<p>Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1:250.000</p>	<p>Good Governance Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor</p>
			<p>Update (pembaruan) indikasi data dan informasi DDDTLH nasional (skala 1:500.000)</p>
	<p>Monitoring dan Evaluasi Penerapan Data dan Informasi DDDTLH Pulau/Kepulauan, K/L (sektor) kawasan strategis nasional dan proyek strategis nasional</p>	<p>Pembinaan Pegawai Lingkup Direktorat PDLKWS</p>	
	<p>Pengembangan Perangkat DDDTLH Daerah</p>	<p>Update (pembaruan) indikasi data dan informasi DDDTLH nasional (skala 1:500.000)</p>	
	<p>Penerapan instrumen DDDTLH di daerah melalui Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Asistensi Teknis Penyusunan DDDTLH Daerah</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi Penerapan Data dan Informasi DDDTLH Pulau/Kepulauan, K/L (sektor) kawasan strategis nasional dan proyek strategis nasional</p>	
	<p>Pemetaan Ekoregion</p>	<p>Pengembangan Perangkat DDDTLH Daerah</p>	
	<p>Asistensi Penerapan Peta Ekoregion</p>	<p>Penerapan Instrumen DDDTLH di daerah melalui Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Asistensi Teknis Penyusunan DDDTLH Daerah</p>	

Tabel 10. Struktur Kegiatan Tahun 2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Tersusunnya Neraca SDA-LH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDA Nasional dan PDB Hijau	Rekomendasi kebijakan Perangkat Ekonomi Lingkungan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA-LH Tematik Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait Penguatan Instrumen Ekonomi Lingkungan Peningkatan NSPK dan Metode Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor Roda Dua/Empat

Pada tahun 2019, target kinerja utama kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor lebih kecil dari sasaran kegiatan sebagaimana telah disusun dalam rencana strategi tahun 2015-2019, yang disebabkan oleh alokasi anggaran tahun 2019 yang belum sesuai dengan rencana alokasi anggaran dalam Renstra. Pagu Anggaran untuk Kegiatan pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (400199) Tahun 2019 ditetapkan sebesar **Rp. 4.477.094.000,-** (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Puluh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau bertambah sebesar Rp 668,928,000,- (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari DIPA Tahun 2018.

Rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Tahun 2019 dipergunakan sebagai acuan utama oleh seluruh Subdirektorat (unit eselon III) lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam menyusun Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) Tahun 2019, dimana seluruh output kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2019 harus berdasarkan pada output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan dalam rencana kerja ini.

Harapannya adalah seluruh kegiatan yang direncanakan ketika dituangkan ke dalam DIPA Tahun 2019 akan lebih terarah pengalokasiannya dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional, secara spesifik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan program planologi kehutanan dan tata lingkungan melalui penyiapan instrumen dan regulasi guna percepatan penataan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampungnya.

Implementasi dari penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA)/ DIPA Tahun 2019 selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019.